

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **6.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan sertifikat halal bagi UMK di Kota Depok, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Ukuran dan tujuan

Sertifikat halal gratis bagi UMK di kota Depok secara jelas menyesuaikan dengan regulasi yang ada dan memiliki bentuk pedoman penunjuk Implementasi dan pedoman petunjuk teknis yang mengatur kebijakan tersebut. Dalam pelaksanaannya masih terdapat kontradiksi dengan tujuan serta ukuran dan tujuan terlalu ideal dalam pelaksanaannya kepada pelaku UMK untuk keberhasilan pada Oktober 2024.

2. Sumber Daya

Implementasi sertifikat halal gratis telah tersedia sumber daya dalam mendukung kebijakan. Akan tetapi sumber daya pegawai yang mengelola website sihalal masih kurang hal ini menyebabkan proses pendaftaran sertifikat halal gratis menjadi kendala dan sumber daya waktu dalam proses pendaftaran sertifikat halal yang dilakukan secara online membuat pelaku UMK menunggu informasi dari pendamping PPH dalam pendaftaran karena kurang peka terhadap teknologi.

3. Karakteristik agen pelaksana

Karakteristik Agen pelaksana dalam pelaksanaannya terdapat perubahan dalam agen pelaksana yakni dari Komisi Fatwa MUI ke Tim Pelaksanan Tugas Komite Fatwa Produk Halal yang dimana semua agen pelaksana memiliki peran dan tanggung jawab dalam kebijakan tersebut, akan tetapi regulasi yang berubah dalam proses pendampingan halal kepada pelaku UMK yang mengakibatkan perlu disosialisasikan kembali serta website Sihlal yang terkadang lambat dalam memproses pendaftaran.

4. Sikap dan kecenderungan para pelaksana

Sikap dan kecenderungan para pelaksana memiliki keseriusan dan komitmen yang tinggi dari para pelaksana untuk kebijakan sertifikat halal gratis bagi UMK di kota Depok yang dapat mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

5. Komunikasi antar organisasi pelaksana

Komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh para pihak pelaksanaan berjalan dengan baik dan lancar, akan tetapi dalam melakukan komunikasi kepada pelaku UMK belum terlaksana dengan baik kepada seluruh UMK.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial dikota Depok mendukung kebijakan tersebut akan tetapi kondisi sosial UMK yang tidak stabil dan berubah-ubah sehingga dalam sasaran UMK memiliki sertifikat halal gratis menjadi sulit dan kondisi ekonomi memiliki peluang bagus dalam pelaksanaannya yang didukung pula oleh pimpinan dan tokoh di kota Depok yang mendukung kebijakan tersebut.

## 6.2 Saran

Bahwa dalam penelitian ini masih akan kekurangan ilmu akan tetapi semua yang disajikan setidaknya sudah menjadi referensi. Adapun saran dalam penelitian ini yakni :

1. BPJPH perlu melakukan pengawasan kepada UMK untuk 3 tahun sekali untuk pemeriksaan bahan dan proses produk halal agar tidak terjadi kontradiksi dengan tujuan kebijakan.
2. Kementerian Agama daerah Depok dan Dinas Koperasi Usaha Mikro Depok perlu menyebarkan informasi dengan papan pengumuman di setiap kelurahan atau di jalan yang ramai dilalui terkait kebijakan tersebut
3. BPJPH perlu menambah pegawai dalam mengelola website Sihahal
4. Perlu adanya pendampingan yang intens kepada pelaku UMK oleh para pelaksana kebijakan sertifikat halal gratis